

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan keuangan daerah yaitu berupa pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Menurut UU No.32 Tahun 2003 tentang pengertian APBD adalah sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dalam peraturan Daerah (Perda). Pengelolaan keuangan daerah dimulai dengan perencanaan/penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD), yang kemudian disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan APBD sebagaimana berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara APBD disusun dengan tujuan untuk dijadikan pedoman oleh pemerintah daerah dalam mengatur penerimaan dan belanja untuk pelaksanaan pembangunan daerah sehingga kesalahan, pemborosan dan penyelewengan yang merugikan dapat dihindari.

Dalam undang-undang Nomer 9 tahun 2015 tentang pemerintah daerah dan undang-undang Nomer 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah di atur bahwa pendapatan pemerintah terdiri atas Pendapatan asli

Daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan akumulasi dari pos penerimaan pajak yang terdiri atas pajak daerah dan retribusi daerah, pos penerimaan non pajak berupa penerimaan hasil perusahaan milik daerah, pos penerimaan investasi serta pengelolaan sumber daya alam (Bastian, 2002). menurut Halim (2007). PAD adalah penerimaan daerah yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang di peroleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang di pungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan asli daerah (PAD) bersumber dari penerimaan pajak, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu indikator yang menentukan derajat kemandirian suatu daerah. Semakin besar Pendapatan asli daerah yang ada di suatu daerah maka semakin rendah tingkat ketergantungannya terhadap pemerintah pusat. Sebaliknya jika tingkat Pendapatan asli daerah rendah maka semakin tinggi tingkat ketergantungannya terhadap Pemerintah Pusat. Hal ini dikarenakan Pendapatan asli daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang

berasal dari daerah itu sendiri. Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yakni pajak daerah dan retribusi daerah yang memiliki kontribusi yang sangat penting dalam membiayai pemerintah dan pembangunan daerah karena pajak dan retribusi daerah bermanfaat dalam meningkatkan kemampuan penerimaan Pendapatan asli daerah dan juga mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, kemandirian keuangan daerah berarti pemerintah dapat melakukan pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan sendiri, melaksanakan sendiri dalam rangka asas desentralisasi. Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber yang diperlukan daerah (Halim, 2007:232).

Kota Kupang merupakan sebuah kota madya dan sekaligus ibukota Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Salah satu visi Kota Kupang adalah terwujudnya Kota Kupang yang Layak Huni, Cerdas, Mandiri dan Sejahtera dengan Tata Kelola Bebas KKN. Untuk itulah dalam mewujudkan dan mencapai visi tersebut Pemerintah Kota Kupang, peranan keuangan daerah sangat dibutuhkan dalam menjalankan fungsi pemerintahan yang efektif dan efisien.

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota

Kupang Tahun 2015-2020

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase (%)
2015	Rp. 1.037.957.615.713	Rp. 1.020.930.686.935	98,36%
2016	Rp. 1.190.074.517.368	Rp. 1.141.379.963.658	95,91%
2017	Rp. 1.204.715.632.412	Rp. 1.156.105.794.118	95,97%
2018	Rp. 1.193.807.700.620	Rp. 1.169.535.197.600	97,97%
2019	Rp. 1.211.442.341.922	Rp. 1.164.514.406.237	96,13%
2020	Rp. 1.148.840.306.941	Rp. 1.128.428.149.265	98,22%

Sumber : data diolah 2022

Berdasarkan tabel 1.1 di atas mengenai data Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah di Kota Kupang selama tahun 2015-2020 merupakan data awal bagi penulis dalam penelitian terkait dengan Efektifitas Pendapatan Asli Daerah dari tahun awal sampai tahun akhir penelitian, Kontribusi Sumber PAD setiap tahun dari tahun awal sampai tahun akhir penelitian serta perkembangan Trend pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun 2021-2025.

Dalam penelitian tentang Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD), penulisan berfokus pada hasil yang akan dicapai, maka penulis akan memberikan suatu batasan masalah yaitu mengambil daerah penelitian di Kota Kupang dengan menganalisis data anggaran dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Kupang. Analisis Pendapatan Daerah (PAD) ini memuat indikator Analisis efektivitas, Analisis kontribusi sumber Pendapatan Asli Daerah

(PAD) serta analisis Trend Pendapatan Asli Daerah tahun 2021-2025 di Kota Kupang.

Salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk menganalisis Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang adalah laporan Target dan realisasi Pendapatan Asli daerah (PAD) dengan melakukan analisis Efektivitas, Analisis Kontribusi dan Analisis Trend.

Analisis efektivitas digunakan untuk melihat kemampuan pemerintah daerah dalam mencapai realisasi atas target yang diberikan. menurut Mardiasmo (2002,134) efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Efektivitas digunakan untuk membantu menganalisis sejauh mana realisasi penerimaan daerah berhasil mencapai potensi atau target yang harus dicapai pada suatu periode tertentu. Menurut Mahsun (2006;187) rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

Analisis Kontribusi di gunakan untuk mengetahui seberapa besar peranan seluruh pendapatan asli daerah dalam meningkatkan penerimaan daerah sehingga dengan adanya data tersebut dapat memberikan data yang jelas mengenai tindakan atau kebijakan yang harus di lakukan pemerintah daerah dalam usaha meningkatkan peran seluruh penerimaan daerah (Halim,

2002). Rasio kontribusi digunakan untuk mengetahui mengetahui seberapa besar masing-masing peran PAD dalam pembentukan PAD itu sendiri.

Analisis trend merupakan suatu mode analisis yang ditujukan untuk melakukan suatu estimasi atau peramalan pada masa yang akan datang. Model trend ini biasa digunakan untuk memprediksi suatu persoalan.

Penelitian sebelumnya, Berwulo, Masinambow, Wauran (2017) menemukan hasil Analisis Pendapatan Asli Daerah di Kota Jayapura sejak awal tahun penelitian hingga akhir tahun penelitian menunjukkan bahwa Efektivitas penerimaan daerah terlebih pendapatan asli daerah terus menerus menunjukkan angka positif setiap tahunnya bahkan selalu menunjukkan angka efektivitas di atas 100% setiap tahunnya.

Aji, Kirya, Susila (2015) juga melakukan penelitian tentang Analisis Sumber Pendapatan Asli Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Buleleng dan hasilnya menunjukkan bahwa efektivitas sumber PAD tahun anggaran 2009-2013 berada pada kategori sangat efektif dengan rata-rata 112,48%. Sedangkan kontribusi terbesar pada tahun anggaran 2009-2013 diperoleh dari lain-lain yang sah sebesar 43,13%. Dan estimasi sumber PAD tahun anggaran 2014 menunjukkan seluruhnya mengalami peningkatan penerimaan dari tahun

sebelumnya kecuali retribusi daerah, efektivitas PAD tahun 2014 memiliki kategori sangat efektif dengan rata-rata sebesar 110,89%, dan kontribusi tertinggi tahun 2014 diperoleh dari lain-lain PAD yang sah sebesar 51,34%.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Pendapatan Asli Daerah di Kota Kupang Tahun 2015-2020**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka permasalahan dalam penelitian ini adalah Analisis Pendapatan Asli Daerah di Kota Kupang Tahun 2015- 2020 terkait dengan efektifitas, kontribusi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan perkembangan Trend Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2021-2025?

1.3 Persoalan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka persoalan penelitian yang akan dibahas dalam penelitian yaitu :

- a. Bagaimana Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota kupang?
- b. Bagaimana Kontribusi Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Kupang ?
- c. Bagaimana Trend Pendapatan Asli Daerah Tahun 2021-2025 di Kota Kupang?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah : Menganalisis Pendapatan Asli Daerah di Kota Kupang terkait dengan Efektifitas, Kontribusi sumber Pendapatan Asli Daerah dan Trend Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2021-2025.

1.4.2 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis berupa masukan bagi pemerintah Kota Kupang untuk memperbaiki permasalahan yang dihadapi, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan pemerintah.

2. Manfaat Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan kepada pembaca teristimewa dosen dan mahasiswa yang ada di Fakultas Ekonomi sebagai literatur bahan dalam penelitian yang berhubungan dengan ilmu keuangan.